

## BAB IV

### SNOUCK HURGRONJE DAN KEBIJAKAN POLITIKNYA TERHADAP UMAT ISLAM

#### A. Christiaan Snouck Hurgronje

Christian Snouck Hurgronje lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda, dan meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936.<sup>1</sup> Ia adalah seorang orientalis (ahli ketimuran) berkebangsaan Belanda, ahli Bahasa Arab, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman.<sup>2</sup>

Snouck Hurgronje merupakan anak keempat pasangan pendeta JJ. Snouck Hurgronje dan Anna Maria, putri pendeta D. Christian de Visser.<sup>3</sup> Snouck Hurgronje memasuki sekolah lanjutan H.B.S. di Breda untuk mempelajari bahasa Latin dan Yunani (Greek).<sup>4</sup> Kemudian ia masuk Universitas Leiden pada 1875, dalam usia 18 tahun. Mula-mula masuk Fakultas Teologi, kemudian pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab. Pada 24 Nopember 1880 studinya di Leiden berakhir dan ia meraih gelar *doctor* sastra Arab, tamat dengan predikat

---

<sup>1</sup> Guntur Pribadi, "Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje dan Implikasinya terhadap Peminggiran Politik Islam di Indonesia", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2004), 17.

<sup>2</sup> Abuddin Nata, "Christiaan Snouck Hurgronje", Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Islam jilid 6/editor bahasa , Nina M.Armando et.al., Jakarta: Ichtiar Bau van Hoeve, 2005. 226.

<sup>3</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 119.

<sup>4</sup> Pribadi, "Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje", 18.

*cumlaude* dengan disertasi *Het Mekkaansche Feest* (Perayaan di Makkah).<sup>5</sup> Setelah menyelesaikan pendidikannya, Snouck mengajar pada pendidikan khusus calon pegawai untuk Hindia Belanda (*Indologie*), di Leiden. Pada 1885, Snouck pergi ke Makkah untuk memperdalam pengetahuan praktis tentang bahasa Arab selama sekitar 6 bulan (Februari-Agustus 1885).<sup>6</sup>

Di Makkah Snouck menyatakan diri masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Gaffar pada 16 Januari 1885, di hadapan Qadi Jeddah dengan dua orang saksi. Setelah itu Snouck pindah tinggal bersama-sama dengan Aboebakar Djajadiningrat, seorang tokoh rakyat Aceh yang kebetulan tinggal sementara di Makkah.<sup>7</sup> Namun, dalam surat kepada seorang teman sekaligus gurunya yang ahli islamologi Jerman Theodor Noldeke, ia menyebutkan bahwa ia hanya melakukan *idhar al-islam*, bersikap Islam secara lahiriah. Dalam suratnya tersebut ia juga menyebutkan bahwa semua tindakannya itu sebenarnya adalah untuk menipu orang Indonesia agar mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.<sup>8</sup>

Dari pengalamannya di Makkah, Snouck melihat sifat fanatik umat Islam Hindia Belanda, terutama suku Aceh, dalam melawan Belanda. Karena itu, niatnya untuk mengetahui Hindia Belanda semakin kuat. Setelah dari Makkah,

---

<sup>5</sup> E. Gobe, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jilid I. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990), v.

<sup>6</sup> Amirul Hadi, "Orientalisme dan Kolonialisme: Analisa Terhadap Misi Christiaan Snouck Hurgronje di Aceh", dalam *Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-ilmu Ushuluddin* (Edisi X, Tahun ke-9, Juli-Desember 2004), 2.; Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 119.

<sup>7</sup> Budi Ichwayudi, "Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje", dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* (Volume 01, Nomor 01, Maret 2011), 61.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 62.

Snouck kembali mengajar di Leiden.<sup>9</sup> Setelah itu, pada 1887 ia menulis sepucuk surat kepada Pemerintah Belanda agar diizinkan pergi ke Hindia Belanda, untuk membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda guna lebih lanjut menelaah agama Islam dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu selama dua tahun, dan telah dikabulkan pada 1889.<sup>10</sup>

Pada tanggal 1 April 1889, Snouck Hurgronje mengadakan perjalanan ke Indonesia. Tujuan pertama adalah kota Penang, dan dari Penang Snouck bermaksud ke pedalaman Aceh dan kemudian tiba di sekitar Istana Sultan Aceh di Keumala. Tujuan dari perjalanannya itu adalah mengumpulkan informasi-informasi militer dan strategi guna membantu pelaksanaan perang di Aceh. Tetapi sesampainya di kota Penang, Snouck ditemui oleh konsul pemerintah kolonial Belanda dan diperintahkan untuk melapor kepada Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Setelah mengadakan laporan atas kedatangan Snouck ternyata pihak militer kolonial Belanda di Aceh tidak setuju dengan strategi Snouck Hurgronje menyusup sendiri, karena dikhawatirkan akan keselamatannya. Snouck pun kemudian ke Batavia.<sup>11</sup>

Snouck Hurgronje tiba di Batavia pada 11 Mei 1889. Lima hari setelah kedatangannya di Batavia pada 16 Mei 1889, keluarlah beslit Gubernur Jenderal yang mengangkat Snouck Hurgronje sebagai petugas peneliti Indonesia selama dua tahun, dengan gaji f.700,- sebulan. Penugasan Snouck kemudian dikuatkan

---

<sup>9</sup> Nata, "Christiaan Snouck Hurgronje", 226.

<sup>10</sup> E. Gobe, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*. Jilid I, vii.

<sup>11</sup> Pribadi, "Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje", 18-19.

dengan beslit Raja. Snouck menetap sementara di Batavia untuk meneliti Islam di Jawa.<sup>12</sup>

Setelah dua tahun yang diperkenankan itu berakhir, Snouck Hurgronje, dalam sepucuk surat pada bulan Mei, 1890, menyatakan harapan agar Pemerintah Hindia Belanda hendaknya mendesak agar ia secara tegas diberi ikatan dinas di Hindia Belanda.<sup>13</sup> Perintah untuk penyelidikan baru dari pihak Pemerintah baru diberikan pada Februari 1891, yakni ketika Pemerintah menganggap penyelidikan tentang keadaan religius-politik di Aceh lebih mendesak dibandingkan dengan melanjutkan pekerjaan di Jawa.<sup>14</sup>

Tidak lama kemudian, 15 Maret 1891, diangkat menjadi Penasehat Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam; dan pada tahun itu juga, 9 Juli, berangkat ke Aceh dan menetap di Kutaraja. Setelah hampir setahun berada di Aceh, pada 4 Februari 1892 Snouck kembali ke Batavia. Antara tahun 1898 sampai 1903 Snouck Hurgronje sering pergi ke Aceh untuk membantu Van Heutsz<sup>15</sup> dalam menaklukkan Aceh.<sup>16</sup> Pada saat itulah Snouck menjalankan misinya dengan bergabung dalam operasi-operasi militer selama 33 bulan di Aceh. Dalam moment ini Snouck Hurgronje memanfaatkan jabatannya dengan memimpin suatu dinas intelijen. Hasilnya dalam tugasnya itu, Snouck Hurgronje dapat

---

<sup>12</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 118.

<sup>13</sup> E. Gobe, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*. Jilid I, vii.

<sup>14</sup> *Ibid.*, viii.

<sup>15</sup> Gubernur Sipil dan Militer daerah Aceh pada 1898, menggantikan Jenderal Deyckerhoff yang dipecat setelah Teuku Umar membelot. *Ibid.*, ix.

<sup>16</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 116.

menawan 100 orang barisan perlawanan pada 5 September 1896 di Bouronce, pantai utara Aceh.<sup>17</sup>

Sementara itu mulai 11 Januari 1899 Snouck Hurgronje menjabat Penasehat Urusan Pribumi dan Arab. Disebabkan perbedaan pandangan, maka berakhirlah kerjasamanya dengan Van Heutsz pada tahun 1903. Sesudah itu ia tidak kembali lagi ke Aceh, namun ia tetap bekerja untuk daerah itu, meskipun tanpa mengunjungi<sup>18</sup>.

Pada 12 Maret 1906 berangkatlah Snouck Hurgronje untuk cuti setahun ke negeri Belanda, hampir tujuh belas tahun sesudah tanggal ia memulai kegiatannya di Betawi (11 Mei 1889)<sup>19</sup>. Sewaktu berlibur tersebut, ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Leiden, dan pada 23 Januari 1907 menerima peresmian pengangkatan sebagai guru besar, merangkap sebagai Penasehat Menteri Jajahan. Jabatannya itu dijalankannya sampai meninggal dunia pada Juli 1936, dalam usia 79 tahun.<sup>20</sup>

Karir Snouck Hurgronje memang sangat mengagumkan. Tidak hanya kepandaiannya dalam bidang politik, dimana dari pengalamannya di Aceh ia merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai “politik Islam”. Namun dalam bidang akademik pun pemikiran Snouck sangat berpengaruh, terbukti dari beberapa karyanya yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai

---

<sup>17</sup> Pribadi, “Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje”, 19.

<sup>18</sup> E. Gobe, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*, ix.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 116; Nata, “Christiaan Snouck Hurgronje”, 226.

panduan wajib untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di Hindia Belanda.

Karenanya tidaklah mengherankan sosok Snouck Hurgronje yang merupakan seorang ilmuwan orientalistik dan politikus kolonialis yang produktif seringkali dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terbukti ketika gelar guru besar di Leiden ditawarkan kepadanya, oleh Snouck Hurgronje baru diterima baik setelah Pemerintah mengabulkan syarat yang dikemukakannya. Syaratnya ialah agar hendaknya ia tetap boleh menjalankan jabatan sebagai penasehat dalam urusan-urusan yang menyangkut kepentingan golongan pribumi dan golongan Arab.<sup>21</sup> Sehingga selain menjabat sebagai guru besar, ia juga menjabat sebagai Penasihat Menteri Jajahan.

Di samping kerja ilmiahnya, karya-karya berupa tulisan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, maka nasihat-nasihat, laporan, dan notanya pun turut memberikan pemahaman tentang keserbamampuan dan daya kerja penyusunnya yang luar biasa<sup>22</sup>. Hal tersebut terbukti dan tampak dalam karya-karyanya yang merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran serta pengalaman-pengalamannya, diantaranya:

1. *Het Mekkaansche Feest*, Leiden: E.J. Brill, 1880; edisi Bahasa Indonesia, *Perayaan Makkah*, terj. Supardi, Jakarta: INIS, 1980, merupakan disertasi Snouck.

---

<sup>21</sup> E. Gobebe, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*, x.

<sup>22</sup> *Ibid.*, xv.

2. *De Beteekenis van den Islam voor Zijne Belijders in Oost-Indie*, (Arti Islam bagi Penganutnya di Hindia Timur), Leiden: 1883.
3. *Mekka*, 2 jilid, I: “*Die Stadt und ihre Herren*” (Kota dan Para tuan Penguasanya); II: “*Aus dem Heutigen Leben*” (Dari Kehidupan Dewasa ini), “Leipzig-Den Haag: 1888-1889” dengan lampiran berjudul *Bilderatlas zu Mekka* (Atlas Gambar Makkah). Edisi bahasa Inggris dari jilid II, *Mekka in the latter Part of the 19<sup>th</sup> Century*, terj. J.H. Monahan, Leiden: E.J. Brill, 1931.
4. *De Atjehers (orang-orang Aceh)*, 2 jilid, “*Batavia-Leiden*”, Landsdrukkerij, 1893-1894: edisi terjemahan bahasa Indonesia oleh Ng. Singaribuan, dkk., Aceh di Mata Kolonialis, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
5. *Arabie en Oost-Indie, Rede bij de Aanvarding van het hoogleeraarsambt aan de Reijks-universiteit te Leiden*, (Negeri Arab dan Hindia Timur. Pidato pada penerimaan jabatan Guru Besar pada universitas di Leiden). Leiden, 1907.
6. *Nederland en de Islam* (Negeri Belanda dan Islam). Leiden, 1915, cetakan kedua yang diperluas.
7. *Het Gayoland en zijne Bewoners* (Tanah Gayo dan Penduduknya), Batavia-Leiden: 1903.
8. *Colijn over Indie* (Colijn tentang Hindia), Amsterdam: 1928.
9. *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje* (Karangan C. Snouck Hurgronje), 7 jilid. Diterbitkan dan diberi daftar pustaka serta indeks oleh A.J. Wensinck, Bonn dan Leipzig/Leiden, 1923-1927; Jilid 1 tentang Islam

dan sejarahnya; Jilid II tentang hukum Islam; Jilid III tentang Arab dan Turki; Jilid IV (dua jilid) tentang Islam dan Hindia Belanda; Jilid V membahas tentang kesusastraan Islam.

10. *Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936*; kumpulan aneka saran kepegawaiannya yang dihimpun oleh E. Gobebe dan C. Adriaanse, tiga jilid, 2228 halaman, terbit tahun 1957, 1959, dan 1965.<sup>23</sup>

Dari karya-karya tersebut di atas tampak pemikiran Snouck Hurgronje telah merefleksikan pandangan akademisnya yang “cemerlang”. Tak hanya itu saja karya-karya Snouck pun telah menjadi inspirasi bagi pemerintah Belanda dalam membangun kekuasaannya di Indonesia. Realitas ini dapat ditelusuri dari beberapa karya Snouck yang menjadi rujukan politik pemerintah Hindia Belanda dalam menekan gerakan politik Islam yang dalam pandangan Snouck “terlanjur” berwajah garang dan menakutkan. Di antara karya Snouck yang terpeting dan menjadi semacam “kitab suci” kolonial Belanda dalam “menjinakkan” kekuatan politik Islam di negeri ini adalah, “*Ambtelijke Advies van C. Snouck Hurgronje*”, 1889-1936. Karya ini merupakan nasehat-nasehat Snouck Hurgronje kepada Pemerintah kolonial Belanda yang merupakan hasil penelitiannya di Hindia Belanda dalam menjawab berbagai persoalan mengenai fenomena Islam yang kerap kali dipandang oleh Snouck dalam dua aspek yakni Islam dalam

---

<sup>23</sup> Pribadi, “Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje”, 20-21.



konteks ibadah yang harus “dilestarikan” dan Islam dalam konteks politik yang harus “dimandulkan”.<sup>24</sup>

Tak hanya itu, dalam karyanya yang juga penting oleh pemerintah kolonial Belanda dan dianggap sebagai karya yang “monumental” yakni, *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje*. Karya ini merupakan karangan Snouck Hurgronje yang ia susun berkat hasil petualngannya mempelajari Islam di Makkah. Karyanya ini berjumlah sebanyak tujuh jilid yang kesemuanya berbicara mengenai diskursus Islam, termasuk didalamnya adalah membahas mengenai Islam di Hindia Belanda yang kemudian menjadi bagian dari landasan teori politik Snouck dalam meminggirkan gerakan politik Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

## **B. Kebijakan Politik Snouck Hurgronje**

Meski setiap perang yang dipimpin oleh sultan ataupun para ulama berakhir di meja perundingan. Seperti perjanjian Bongaya (18 November 1667), hasil perundingan yang mengakhiri perang antara VOC dengan Kesultanan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin.

Para pemimpin perang dibuang dan diasingkan dari para pengikut ataupun kelompoknya. Wilayah mereka mampu dikuasai dan diduduki. Misalnya Pangeran Diponegoro dibuang ke luar Pulau Jawa yaitu ke Manado<sup>26</sup>, kemudian

---

<sup>24</sup> Ibid., 22.

<sup>25</sup> Ibid., 23.

<sup>26</sup> Pangeran Diponegoro bersama keluarganya sampai di Manado pada 12 Januari 1830 di darat pulau Selebes. Yamin, *Sejarah Peperangan Dipanegara*, 143.

dipindahkan ke Makassar. Setelah pembuangan tersebut Rakyat di jadikan kuli dalam kebun dan kerja paksa untuk bangsa lain, itulah aturan dalam *cultuur-stelsel*.<sup>27</sup> Pangeran Hidajatoellah dari Kesultanan Banjarmasin dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Demikian pula Tjoet Nja Dhien dari Kesultanan Aceh dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Terjadi juga pembuangan di luar Nusantara Indonesia. Sjech Yusuf dari Makassar di buang ke Tanjung Harapan, Afrika.<sup>28</sup>

Akan tetapi semua itu, tidak memadamkan semangat para rakyat pribumi Nusantara untuk terus memperjuangkan semangat Jihad Islam, mengusir para imperialis kafir dari bumi Nusantara. Pemberontakan yang dilakukan para petani di bawah pemimpin Islam terus berlangsung di seluruh Nusantara. Di Banten timbul perlawanan bersenjata melanjutkan Perang Diponegoro. Dipimpin oleh Soeltan Mohammad Safioeddin.<sup>29</sup>

Mungkinkah penjajah, menurut teori Carl van Clausewitz dalam *On War*, dengan kekuatan militernya dapat memadamkan *enemy's will* (kemauan lawannya) yang selalu cinta kemerdekaan bangsa dan negara serta agamanya? Jawabnya setiap tentara penjajah hanya mampu menguasai dan menduduki wilayahnya semata. Tidak mungkin mampu menguasai kemauan bangsa atau rakyat yang dijajahnya. Pemimpin, Sultan, dan Raja dapat ditaklukkan di meja perundingan. Tidak demikian halnya dengan kemauan rakyat.<sup>30</sup>

Lima puluh tahun kemudian, meletus kembali perlawanan bersenjata, dipimpin Haji Wasid, 1888 M di tengah berlangsungnya Tanam Paksa, 1830-

---

<sup>27</sup> Ibid., 133.

<sup>28</sup> Suryanegara, *Api Sejarah*, 206.

<sup>29</sup> Ibid., 207.

<sup>30</sup> Ibid., 206.

1919 M. Memasuki puluhan ketiga abad ke-20, masih terjadi perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Kiai Haji Nawawi dari Banten, 1927 M.<sup>31</sup>

Wilayah dakwah ulama manapun dapat saja dikuasai oleh penjajah Protestan Belanda. Namun, menurut teori Carl Clausewitz dalam *On War* (tentang Perang) tidak mungkin dengan kekuatan senjata apa pun yang dimiliki oleh penjajah dapat menguasai *the strength of his will* (kekuatan kemauan lawannya).<sup>32</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebutlah Belanda pada 1889 mendatangkan ahli Bahasa Arab dan ahli Islam<sup>33</sup>, Christian Snouck Hurgronje untuk membawa Pemerintah Hindia Belanda ke arah kebijakan politik Islam yang baru dan lebih terarah. Pihak kolonial Belanda dengan banyak kerugian yang dialaminya dalam setiap perang melawan Umat Islam yang dipelopori para Ulama, akhirnya menyadari bahwa untuk menduduki dan menguasai Nusantara tidak bisa hanya dengan mengandalkan kekuatan senjata dan kemampuan militer saja. Terutama dalam menyelesaikan perang Aceh.

Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Max Weber, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.<sup>34</sup> Christiaan Snouck Hurgronje dianggap sebagai peletak dasar kebijakan

kolonial Belanda mengenai Islam di Hindia Belanda. Melalui kebijakan itu, Snouck melawan ketakutan Belanda terhadap Islam, baik di tingkat Internasional

---

<sup>31</sup> Ibid., 207.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 40.

<sup>34</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 268.

maupun tingkat lokal. *Kantoor voor Inlandsche zaken* (lembaga yang berwenang memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda tentang masalah pribumi) yang didirikan pada 1899 merupakan wujud tindak lanjut dari kebijakan yang dirintis Snouck. Dari pemikiran dan saran Snoucklah pemerintah Hindia Belanda berhasil melawan “rasa ketakutan” kaum kolonialis terhadap Islam.<sup>35</sup>

Sebab golongan yang berkuasa tak mungkin bertahan terus tanpa didukung oleh masyarakat. Karena itu golongan tersebut harus senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje ke Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurutnya di dalam Islam tidak mengenal lapisan kependetaan seperti dalam agama Kristen. Kyai tidak apriori fanatik, dan penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi. Ulama independen bukanlah komplotan pemberontak, sebab mereka hanya menginginkan ibadah saja. Pergi menunaikan ibadah haji bukanlah berarti fanatik dan berjiwa pemberontak.<sup>37</sup>

Snouck menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama,

---

<sup>35</sup> Nata, “Christiaan Snouck Hurgronje”, 227.

<sup>36</sup> Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, 269.

<sup>37</sup> Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 41.

melainkan Islam sebagai doktrin politik.<sup>38</sup> Sehingga menurut Snouck, dalam bidang agama Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik.<sup>39</sup>

Dalam pengertian tersebut, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti “Ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan sosial politik”. Dalam hal ini Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda.<sup>40</sup>

Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya harus memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, asalkan tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Mengenai bidang ini pemerintah tidak boleh menyinggung dogma atau ibadah murni. Dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah kolonial, menurut Snouck di kalangan umat Islam akan segera terjadi perubahan secara perlahan untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Snouck melihat bahwa ketaatan sepenuhnya dalam melaksanakan rukun Islam, mengerjakan shalat lima waktu dan melakukan ibadah puasa, merupakan beban berat bagi orang Islam pada abad ini.

---

<sup>38</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 11.

<sup>39</sup> Nata, “Christiaan Snouck Hurgronje”, 227.

<sup>40</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 12.

Beban berat tersebut dinilainya akan menyebabkan mereka semakin menjauhi ikatan yang dinilainya sempit dan kolot. Dalam pemikiran Snouck, melarang sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya itu hanya akan berakibat membangkitkan minat dan perhatian orang terhadap sesuatu yang dilarang tersebut.<sup>41</sup>

Selain itu, Snouck juga memperingatkan pemerintah Hindia Belanda supaya melestarikan tradisi nenek moyang orang pribumi di Hindia Belanda dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi “agama masjid”. Artinya, agama dijadikan ibadah kepada Tuhan semata. Kebijakan ini diambil karena Snouck melihat, bahwa Islam merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda.<sup>42</sup>

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati pemerintah Belanda.<sup>43</sup> Pemerintah mempunyai tujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajah melalui kebudayaan, di mana lapangan Pendidikan menjadi garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid. 13-14.

<sup>42</sup> Nata, “Christiaan Snouck Hurgronje”, 227.

<sup>43</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 12.

<sup>44</sup> Ibid., 39.

Dengan mengabdikan keinginan penduduk Indonesia memperoleh pendidikan, menurut Snouck Hurgronje akan menjamin kekalnya loyalitas mereka terhadap pemerintah kolonial, dan akan berdampak menghilangkan cita-cita Pan Islam<sup>45</sup> dari segala kekuatannya. Secara tidak langsung juga akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi.<sup>46</sup>

Tetapi dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah Belanda harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam.<sup>47</sup> Dalam bidang politik, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme. Unsur politik dalam Islam harus diwaspadai dan kalau perlu ditindak tegas. Berbagai pengaruh asing yang menjurus ke politik harus diwaspadai. Satu hal yang perlu

---

<sup>45</sup> Pengertian Pan-Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai seorang khalifah. Secara modern dapat diartikan bahwa kepemimpinan khalifah tersebut hanya meliputi bidang agama. Pada masa Usmani Muda, Turki berusaha menggunakan Pan-Islam untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah Kesultanan Usmani. Usaha ini cepat menarik perhatian Asia Afrika yang pada waktu itu hampir seluruhnya sedang dijajah oleh Barat. Ide Pan-Islam ini akan memanfaatkan kemajuan Barat dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Pan-Islam sekedar berusaha untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan, atau menghidupkan rasa *Ukhuwah Islamiyah* di kalangan dunia Islam. Meskipun demikian, Pan-Islam dalam pengertian ini tetap dianggap berbahaya oleh negara-negara penjajah, karena bisa membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa Islam yang dikuasainya. Umat Islam di suatu tempat berkat adanya Pan-Islam akan bisa merasakan penderitaan saudaranya di tempat lain. Pada 1884 Jamaluddin al Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah *Al Urwatul Wutsqa* di Paris. Melalui majalah ini mereka berusaha menyadarkan dunia Islam agar menemukan kembali kepribadiannya. Diimbaunya dunia Islam agar berpegang teguh kepada agamanya, sebab disitulah terletak kekuatan Islam. Meskipun demikian tidak digalakkannya *ta'assub* berlebihan sehingga merusak hak orang lain, atau berusaha memusnahkan agama lain. Setiap kepala pemerintahan muslim diserukannya harus berpegang teguh pada hukum syariah. Dicanangkannya persatuan sesama umat dan bangsa Islam. Seorang muslim sehatusnya merasa sedih dan prihatin tatkala mendengar berita kejatuhan suatu negara Islam ke tangan negara bukan Islam. Ibid., 80)

<sup>46</sup> Ibid., 40.

<sup>47</sup> Ibid., 12.

diperhatikan dalam hal ini adalah menghindari segala tindakan yang berkesan menentang kebebasan beragama.

Pemerintah kolonial selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan kekuasaannya. Seperti gerakan tarekat yang dianggap sebagai bahaya dari dalam, disamping gerakan Pan-Islam yang dianggap pemerintah kolonial sebagai bahaya dari luar. Dalam hal ini para haji menduduki posisi sangat penting sebagai faktor pembawa pengaruh Pan Islam dari luar, sehingga mereka pun sering dicurigai dan selalu diawasi oleh pemerintah.<sup>48</sup>

Kebijakan lain juga diajukan Snouck kepada pemerintah Hindia Belanda, yakni mengawasi kas masjid agar tidak digunakan untuk hal yang membahayakan kekuasaan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus selektif terhadap jemaah haji dari Hindia Belanda karena tidak semua orang yang beribadah haji itu fanatik dan berjiwa pemberontak. Banyak di antara mereka yang pergi ke Makkah benar-benar untuk beribadah.<sup>49</sup>

Snouck Hurgronje juga berusaha meyakinkan pemerintah daerah jajahan bahwa seorang ulama atau kiai itu belum tentu fanatik. Para penghulu yang berpengaruh kuat itu adalah bawahan pemerintah. Oleh karena itu, dalam mengangkat seorang penghulu, pemerintah hendaklah melakukan penelitian

---

<sup>48</sup> Ibid., 79.

<sup>49</sup> Nata, "Christiaan Snouck Hurgronje", 227.



cermat dan penyaringan ketat supaya jabatan tersebut jangan sampai dipercayakan kepada orang yang “membahayakan” pemerintah.<sup>50</sup>

Di samping itu, Snouck juga menasihati pemerintah Hindia Belanda untuk tidak terlalu optimis terhadap pemurtadan umat Islam. Usaha pemurtadan itu tidak mungkin berhasil karena kenyataan menunjukkan bahwa semakin hari pengaruh kebudayaan santri semakin berkembang luas. Karena itu, usaha kristenisasi yang dilakukan tidak terlalu bermanfaat.<sup>51</sup>

Dalam bidang kemasyarakatan, dimana pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan adat kebiasaan pribumi dan mendorong rakyat untuk melestarikannya. Kebijakan ini didasarkan pada “teori resepsi” (teori dalam hukum perdata) yang dikembangkan Snouck Hurgronje dalam kaitannya dengan hukum Islam di Hindia Belanda, yang menyimpulkan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Hukum Islam baru berlaku di Indonesia apabila ia telah menjadi hukum adat, sehingga ketika akan diberlakukan, hukum Islam itu akan muncul sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Teorinya yang banyak mendapat dukungan dari ahli hukum ini berintikan pemikiran bahwa hukum adat itu lebih tinggi dari hukum Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

## C. Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam di Indonesia

### 1. Politik *divide et empera*

Politik Hindia Belanda untuk melemahkan atau menghilangkan kekuatan politik Umat Islam Indonesia, salah satunya yakni politik *divide et empera*. Pada awalnya Belanda dengan penuh hormat meminta izin untuk membuka kantor dagang di Banten dan daerah kesultanan lainnya. Namun ketika sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi kesultanan-kesultanan di Nusantara, Belanda berusaha menanamkan ekspansi politiknya. Dari Batavia, yang dijadikan pusat kekuasaannya, Belanda memerangi kesultanan-kesultanan Nusantara. Menggunakan politik *divide et empera*, memecah belah dan menguasai, Belanda berhasil menaklukkan satu persatu kesultanan di kawasan Nusantara. Secara bertahap kesultanan-kesultanan Nusantara dijadikan bawahan pemerintah Hindia Belanda.<sup>53</sup>

Pihak Belanda mulai ikut campur tangan dalam masalah internal kenegaraan mulai dari penggantian tahta, menentukan kebijaksanaan politik sampai pada pengangkatan pejabat masing-masing. Situasi ini menyebabkan penguasa tradisional semakin tergantung kepada kekuasaan Belanda. Dalam proses selanjutnya kepala-kepala pemerintahan tradisional itu hanyalah merupakan bagian dari dunia pegawai Hindia Belanda.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 194.

<sup>54</sup> Ibid.

Masuknya perangkat struktur pemerintahan tradisional ke dalam lingkaran pemerintah Hindia Belanda, maka kekuasaan Belanda semakin kokoh juga. Apalagi pemerintah Belanda mengembangkan pula sistem pemerintahan dan kehidupan Barat di kalangan birokrat tradisional. Selain itu Westernisasi dikembangkan dalam gaya hidup sosial. Kesemuanya ini semakin memisahkan hubungan antara elite birokrasi tradisional dengan para pemuka agama, serta masyarakat lapisan bawah.<sup>55</sup>

## **2. Politik monopoli perdagangan dan *cultuurstelsel***

Untuk menguasai per-ekonomian umat Islam di Indonesia, Belanda menggunakan sistem monopoli perdagangan. Waktu VOC memulai kegiatannya di Indonesia dihadapinya suatu dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Dalam menghadapi sistem itu maka VOC dalam usahanya menguasai perdagangan rempah-rempah, berusaha menduduki dua basis kota perdagangan Nusantara, Maluku dan Malaka. Telah ditentukan pula alternatif lain sebagai pengganti Malaka, ialah Batavia.<sup>56</sup>

Pada awalnya VOC menghadapi kesulitan dalam usahanya menerobos sistem perdagangan yang berlaku. Kontrak-kontrak yang digunakan untuk memperoleh monopoli tidak dapat berjalan lancar karena tidak ada dukungan

---

<sup>55</sup> Ibid., 195.

<sup>56</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru I*, 73.

kekuatan politik. Di kalangan VOC sendiri banyak yang menentang penggunaan kekerasan.<sup>57</sup>

Jalan radikal untuk merebut monopoli ialah melarang semua pengangkutan barang dagangan Portugis dengan kapal pribumi; semua ekspor rempah-rempah perlu dihentikan, bahkan lebih drastis lagi yaitu pohon-pohon pala dan cengkeh ditebangi. Sebaliknya ada saran untuk mengikuti jejak Portugis, yaitu menukar rempah-rempah dengan bahan pakaian dan bahan makanan.<sup>58</sup>

Politik radikal lain yang dipertimbangkan ialah untuk mengendalikan dan membatasi perdagangan Asia seperti yang telah dilakukan bangsa-bangsa Asia dan Portugis sejak lama, namun hal itu terbentur pada kelemahan angkutan VOC yang serba kekurangan awak kapal, amunisi, dan kapal sehingga tidak dapat mengawasi dan memberlakukan sanksinya.<sup>59</sup>

Langkah lain, seperti memblokir selat Malaka dan perdagangan Portugis, akan menguntungkan bangsa Barat lainnya, Pedagang Jawa, Gujarat, yang bebas dari persaingan Portugis, dapat bergerak secara leluasa. Kapasitas VOC sendiri masih sangat terbatas sehingga penghentian perdagangan Asia akan menimbulkan kekosongan, banyak permintaan berbagai jenis komoditi tak dapat dipenuhi.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., 73.

<sup>58</sup> Ibid., 73.

<sup>59</sup> Ibid., 73.

<sup>60</sup> Ibid., 74.

### **Penghapusan Etnis**

Praktek VOC dikepulauan Banda akhirnya memperlihatkan politik kekerasan. Sewaktu diketahui bahwa kontrak rakyat Banda dengan VOC tidak diindahkan dan masih melakukan perdagangan dengan pedagang Asia, seperti Cina, para direktur VOC menganjurkan agar rakyat Banda dibuat punah dan pulau diberi penduduk lain.<sup>61</sup>

### **Mematikan kesadaran pemasaran**

Kedatangan Belanda ke Nusantara tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, VOC, namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan, dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan.<sup>62</sup>

Terutama dengan adanya upaya Barat untuk mempertahankan penjajahannya, dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda dengan cara menyebarkan “ajaran Islam” dengan melalui hadits yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid

---

<sup>61</sup> Ibid., 74.

<sup>62</sup> Suryanegara, *Api Sejarah*, 5.

daripada yang di pasar. Dampaknya secara perlahan-perlahan, patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi.<sup>63</sup>

Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Bangsa Timur Asing: Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial, kalangan Bangsa Timur Asing tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas dua, dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas tiga. Pasarnya disita, serta kekuasaan ekonominya dipatahkan, pribumi Islam menjadi sangat terbelakang.<sup>64</sup>

### **Eksplorasi rakyat**

Usaha Belanda untuk menguasai kesultanan-kesultanan Indonesia dengan politik *divide et empera*, ternyata berhasil membuat kesultanan-kesultanan Indonesia menjadi bawahan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sengaja tidak menghancurkan kesultanan-kesultanan tradisional agar dapat dipakai sebagai alat usaha eksploitasi. Personalia pemerintah Hindia Belanda yang terbatas itu kurang mampu untuk menangani daerah-daerah yang demikian luas. Jadi, Belanda menggunakan tangan-tangan birokrat tradisional, dan secara efektif dapat mengeksploitasi rakyat Indonesia.<sup>65</sup>

Pencaplokan wilayah yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, menyebabkan semakin sempitnya areal tanah para penguasa tradisional. Maka

---

<sup>63</sup> Ibid., 7.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 195.

semakin terbataslah penghasilan mereka, dan para penguasa tradisional semakin tergantung pada pemerintah Hindia Belanda. Ketergantungan ekonomi mendorong semakin tergesernya orientasi – pengayoman kepada rakyat semakin rapuh. Mereka telah berfungsi sebagai pegawai kolonial daripada pemimpin masyarakat.<sup>66</sup>

### *Cultuurstelsel*

Setelah perang Jawa (perang Diponegoro) berakhir, ekonomi negeri Belanda mencapai tingkat defisit yang tinggi. Untuk memulihkan perekonomian itu, pemerintah Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sebagai pemimpin tertinggi di daerah jajahan. Tugasnya, meningkatkan produksi tanaman ekspor. Untuk melaksanakan tujuan itu, van den Bosch memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai *cultuurstelsel* (Tanam Paksa). Sistem eksploitasi berupa penyerahan wajib yang pernah dilaksanakan di masa VOC. Ciri utama dari sistem Tanam Paksa ini, adalah keharusan bagi para petani untuk membayar pajak dalam bentuk barang atau hasil-hasil pertanian.<sup>67</sup>

Biasanya hasil bumi ini berupa hasil bumi untuk ekspor seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Menurut perkiraan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun. Melalui jalan ini pemerintah akan terjamin

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid., 191.

kebutuhan hasil buminya yang akan diekspor ke pasaran Eropa, dan dari ekspor ini pemerintah mengharapkan keuntungan-keuntungan yang nyata.<sup>68</sup>

Pada periode tanam paksa ini kekuasaan kaum bangsawan feodal dikembalikan ke posisinya yang lama, sehingga pengaruh mereka dapat dipergunakan untuk menggerakkan rakyat, memperbesar produksi, dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh pemerintah. Maka dalam *cultuurstelsel* ini tidak lebih dari pelaksana-pelaksana yang diperintahkan dari atas. Mereka hanya dijadikan “pengawas-pengawas perkebunan.”<sup>69</sup>

*Cultuurstelsel* harus seproduktif mungkin, oleh karena itu pengawasan Belanda diperkeras, sehingga banyak penyelewengan-penyelewengan atau penyalahgunaan yang timbul dalam selama perkembangan sistem itu. Penyalahgunaan yang paling mencolok seperti berikut. Pada hakikatnya luas tanah yang diusahakan untuk pemerintah tidak ada batasnya; banyak tenaga yang terbuang sia-sia untuk mencoba tanaman-tanaman baru; adanya kerja tambahan di samping menyelenggarakan tanaman-tanaman wajib; pajak-pajak, kerja wajib, dan kewajiban-kewajiban lainnya tidak dihapus. Teranglah bahawa sistem itu mengakibatkan kemerosotan moral dan menunjukkan suatu ontras yang tajam dengan motivasi van den Bosch. Seperti apa yang dikatakannya, sistem itu bertujuan untuk memajukan dan mendidik rakyat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 13.

<sup>69</sup> Ibid., 14.

<sup>70</sup> Ibid., 15.



Penetrasi kekuasaan kolonial melalui sistem ini menyebabkan perubahan dalam masyarakat Jawa berlangsung dengan sangat cepat. Pengenalan berbagai tanaman perdagangan dan berbagai kebijaksanaan Tanam Paksa ini menyebabkan terhentinya masyarakat Jawa di pedesaan ke dalam suatu sistem perekonomian dunia karena munculnya permintaan akan tanaman perdagangan di pasaran internasional.<sup>71</sup>

Perluasan sistem Tanam Paksa untuk menggantikan tanaman dan beras, semakin membuka kekuasaan pemerintah atas struktur desa dalam kaitannya dengan sistem pemilikan pribadi. Ekonomi uang diperkenalkan kepada masyarakat, dengan didirikannya pabrik-pabrik gula di beberapa daerah. Akibat lain, ialah terjadi perubahan pemilikan tanah. Para pengusaha yang semula hanya menyewa desa dari pengusaha lokal, kemudian mengalihkan penyewaan kepada golongan Cina, kemudian para penguasa. Bergeserlah pengaruh penguasa tradisional, atau para kepala adat karena desa kini langsung berhadapan dengan sistem pemerintahan kolonial.<sup>72</sup>

Hasil-hasil finansial *cultuurstlesel* ini bagi Belanda sangat memuaskan, antara tahun-tahun 1831 dan 1877 negara menerima dari daerah-daerah jajahan kekayaan sebesar 823 juta gulden. Sistem ini tidak hanya memberi hasil bagi pemerintah, akan tetapi juga mendorong dan memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda. Selanjutnya sistem ini juga memperkaya

---

<sup>71</sup> Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 192.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 192.

pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang-pedagang, dan lain-lainnya. Pemulihan yang pesat di dalam bidang ekonomi itu disertai lahirnya Partai Liberal yang menggerakkan oposisi yang gigih terhadap politik kolonial konservatif pada umumnya dan *cultuurstelsel* pada khususnya.<sup>73</sup>

### 3. Politik terhadap pendidikan umat Islam di Indonesia

#### Politik ethis

Sejak adanya pernyataan Ratu Wilhelmina pada tahun 1901, maka pemerintahan merumuskan politik pengajaran bagi masyarakat Hindia Belanda. Perluasan pendidikan bagi bumi putera khususnya bagi golongan priyayi mulai dari tingkat rendah hingga menengah.<sup>74</sup> Dimulainya politik kesejahteraan secara resmi tercantum pada Pidato Ratu yang sekaligus merupakan pertanda dimulainya zaman baru dalam pemerintah kolonial.<sup>75</sup> Politik tersebut adalah politik ethis.

Politik ethis adalah politik Hindia Belanda terhadap pendidikan umat Islam Indonesia. Slogan kaum liberal: “meningkatkan kemakmuran dan kemajuan rakyat tanah jajahan,” kongres kaum sosialis yang diselenggarakan di Utrecht pada 1901 banyak menuntut diadakannya perbaikan kolonial, gerakan perbaikan juga dilancarkan oleh yang disebut kaum ethis, menimbulkan orientasi politik kolonial yang baru, yaitu politik ethis. Politik ethis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu “Irigasi, Edukasi, dan

<sup>73</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 2*, 15.

<sup>74</sup> Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 193.

<sup>75</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 2*, 33.

Emigrasi.”<sup>76</sup> Namun dalam pelaksanaannya, trilogi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mempertahankan penjajahannya. Mereka beranggapan bahwa apabila Indonesia merdeka, segalanya akan hilang.<sup>77</sup>

### **Ordonansi guru**

Ordonansi guru adalah salah satu nasehat Snouck Hurgronje terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Ordonansi guru yang pertama kali dikeluarkan pada 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama.<sup>78</sup>

Ordonansi guru pada 1905 ini, dinyatakan berlaku untuk Jawa Madura kecuali Yogya dan Solo. Isi dari ordonansi guru ini antara lain:

- a) Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
- b) Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
- c) Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- d) Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.

---

<sup>76</sup> Ibid., 32.

<sup>77</sup> Suryanegara, *Api Sejarah*, 306.

<sup>78</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 51-52.

- e) Guru agama Islam bisa dihukum kurang maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang.
- f) Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.<sup>79</sup>

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa memberatkan. Selain itu, banyak di antara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf Latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.<sup>80</sup>

Ordonansi Guru 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk meminta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktifitasnya ternyata kurang efisien. Terlebih lagi situasi politik saat itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “pemburuan agama,” karena itu

---

<sup>79</sup> Ibid., 52.

<sup>80</sup> Ibid., 53.

pada 1925 dikeluarkan Ordonansi Guru baru yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin.<sup>81</sup>

- a) Setiap guru agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya.
- b) Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
- c) Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang.
- d) Guru agama bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum f.25,-, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar keterangan/pemberitahuannya, atau lalai dalam mengisi daftar.
- e) Juga bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f.200,-, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.<sup>82</sup>

Peraturan ini sejak 1 Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura, tetapi berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Pada tahun 30-an berlaku pula untuk Bengkulu. Seperti halnya Ordonansi Guru sebelumnya, ordonansi baru inipun dalam praktek bisa dipergunakan untuk menghambat agama Islam, meskipun bukan

---

<sup>81</sup> Ibid., 54.

<sup>82</sup> Ibid.

itu tujuan yang tercantum dalam ketentuan ordonansi tersebut.<sup>83</sup> H. Fachruddin selaku ketua Muhammadiyah menyatakan keluhan bahwa sejak diumumkannya ordonansi ini berbagai rintangan ditimbulkan untuk menghalangi kemajuan dan penyebaran Islam di Indonesia.<sup>84</sup> Banyak reaksi terhadap Ordonansi Guru ini, yang tidak hanya dilancarkan oleh pihak pribumi, tetapi juga oleh pihak Belanda sendiri.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid., 55.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid., 57.